BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan adalah bagian terpenting dari pembangunan suatu bangsa karena memungkinkan pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, yang akan membawa kemajuan dan kesejahteraan negara. Melihat pentingnya pendidikan bagi bangsa dan negara, segala aspek yang memenuhi terselenggaranya pendidikan bermutu dilaksanakan secara efisien baik dari negara maupun pihak-pihak yang terlibat dalam bidang pendidikan. Pihak-pihak yang bertanggungjawab penuh dalam bidang pendidikan meliputi guru, institusi pendidikan, dan pemerintah. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Terselenggaranya proses pendidikan di sekolah yang diperankan oleh guru sebagai pemandu proses pembelajaran dan siswa sebagai objek yang mendapatkan manfaat dari pembelajaran tidak terlepas dari pedoman pelaksanaan pembelajaran yang dikemas dalam bentuk kurikulum pembelajaran. Pembentukan kurikulum pembelajaran terstruktur sistematis dengan berbagai komponen untuk menghasilkan kurikulum yang dapat memperoleh ketercapaian tujuan pendidikan, kurikulum pembelajaran ini dijadikan pedoman oleh guru dalam melaksanakan

proses pembelajaran dengan segala penerapan pembelajaran tidak melenceng dari kurikulum yang berlaku. Sebagaimana yang telah diterapkan bahwa kurikulum tidak menetap pada suatu kurikulum dengan kata lain kurikulum mengalami perubahan seiring dengan diterapkannya dan terdapat evaluasi yang menjadi aspek perubahan kurikulum berdasarkan kebutuhan. Perubahan orientasi, desain, model dan lain sebagainya dengan tujuan utama untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan nasional serta mensejajarkan dengan pendidikan-pendidikan yang ada di dunia (Insani, 2019).

Penerapan pembelajaran yang diharapkan membentuk peserta didik berilmu, berkarakter, dan terampil sejatinya tidak terwujud secara sempurna dengan faktor utama implementasi pembelajaran yang kurang baik diterapkan dari periode kurikulum sebelumnya sampai periode kurikulum yang sekarang Kurikulum Merdeka. Dari hasil evaluasi penerapan pembelajaran sebelum Kurikulum Merdeka mempengaruhi peserta didik cenderung tidak memotivasi peserta didik mendapat pengetahuan, pendidikan karakter, dan keterampilan dengan menggunakan metode pembelajaran yang monoton sehingga mempengaruhi kegagalan tujuan pembelajaran membentuk warga negara yang baik serta berkualitas. Sebagaimana yang dipaparkan dalam tabel berikut menjelaskan perbandingan antara kurikulum 2013 dengan Kurikulum Merdeka sebagai pembaharuan untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembelajaran.

Aspek	Kurikulum Merdeka	Kurikulum 2013
Kerangka	Kurikulum Merdeka	Kurikulum 2013 memiliki

Dasar	memiliki rancangan utama pada kurikulumnya ialah memiliki tujuan Sistem Pendidikan Nasional dan Standar Nasional Pendidikan yaitu untuk mengembangkan profil pelajaran Pancasila pada siswa	suatu perencanaan landasan utama Kurikulum 2013 ialah tujuan Sistem Pendidikan Nasional dan Standar Nasional Pendidikan
Kompetensi yang dituju	Capaian belajar yang disusun ber-fase. Capaian belajar dinyatakan dalam paragraf yang merangkai pengetahuan, sikap, serta keterampilan	Kompetensi Dasar (KD) yang merupakan suatu lingkup utama serta urutan yang digolongkan untuk 4 kompetensi inti (KI) yaitu: sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, serta keterampilan
Struktur Kurikulum	Kegiatan belajar utama, yaitu kegiatan belajar reguler atau rutin yang merupakan kegiatan intrakurikuler serta proyek penguatan profil pembelajaran Pancasila	Pendekatan pembelajaran memakai 1 pendekatan saja yaitu pendekatan saintifik bagi semua mata pelajaran. Pada umumnya kegiatan pembelajaran berfokus pada kegiatan tatap muka, untuk

		kegiatan kurikuler dialokasikan pada beban belajar maksimum 50% diluar kegiatan belajar
Penilaian	Memiliki suatu penguatan pada asesmen formatik dan penguatan pada hasil asesmen untuk melakukan perancangan pembelajaran yang disesuaikan dengan ketercapaian siswa dan tidak adanya penilaian KKM	Penilaian yang dilakukan dengan formatif dan sumatif oleh tenaga pendidikan yang berfungsi untuk melihat kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan untuk perbaikan hasil belajar siswa secara berkesinambungan
Perangkat ajar yang disediakan	Buku teks maupun buku non teks seperti modul ajar, ATP aluran tujuan pembelajaran, contoh projek penguatan profil pembelajaran Pancasila serta kurikulum operasional satuan pendidikan	Berupa buku teks dan buku non teks

(Sari, Sunedar and Anshori, 2022)

Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, menggunakan konten yang lebih optimal agar peserta

didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik (Muslimin, 2023).

Krisis pembelajaran yang disebabkan oleh virus yang menyebar ke seluruh dunia pada tahun 2019 atau yang dikenal sebagai Covid-19 menyebabkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) membuat suatu perubahan kurikulum untuk menangani krisis pembelajaran ini dan sasaran sekolah yang menerapkan Kurikulum Merdeka adalah sekolah yang sudah siap baik itu dari segi fasilitas, jumlah guru dan sebagainya. Kurikulum merdeka ini menekankan bahwa guru dan siswa memiliki kebebasan untuk belajar mandiri. Belajar mandiri, menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, adalah proses pembelajaran yang memberikan kebebasan dan kekuatan kepada setiap lembaga, bebas dari manajemen yang tidak efektif. Pembelajaran kurikulum mandiri sekolah mengemudi terkait dengan profil siswa Pancasila yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berkepribadian, bentuk struktur kurikulum mandiri merupakan kegiatan internal, termasuk proyek-proyek yang mengangkat profil siswa Pancasila (Zakso, 2022).

Perubahan kurikulum menjadi Kurikulum Merdeka mengandung banyak pembaharuan tidak terkecuali nama mata pelajaran yang diubah menjadi Pendidikan Pancasila dari yang sebelumnya dikenal dengan nama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Nama tersebut dibuat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Tujuan pendidikan Pancasila adalah untuk

menciptakan individu yang berkarakter, mandiri, dan berdaya saing tinggi, serta untuk memahami dan mematuhi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Diharapkan pendidikan ini dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian warga negara terhadap kepentingan nasional dan negara, serta menjaga keutuhan dan keberlangsungan negara Indonesia sebagai negara yang plural, demokratis, dan berkeadilan.

Tujuan pembelajaran Pendidikan Pancasila yang menitikberatkan pada aspek penanaman sikap dan kepribadian peserta didik agar menjadi warga negara yang baik, yakni baik kepada Tuhannya, baik kepada negaranya dan baik kepada sesamanya dengan mampu menunjukkan salah satu sikap tanggungjawab sebagai warga negara (*civic responsibility*) dan memiliki keterampilan warga negara yang baik (*civic skill*) dalam bentuk keterampilan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan (*participation skill*) (Ikhtiarti, 2019). Pembentukan warga negara yang baik melalui tiga kompetensi yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*), dan watak kewarganegaraan (*civic disposition*) dapat membentuk watak kewarganegaraan yang baik. *Civic Disposition* sesungguhnya merupakan kompetensi yang sangat substantif dan esensial dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Watak kewarganegaraan (*civic disposition*) dipandang sebagai muara dari dua kompetensi sebelumnya yakni pengetahuan kewarganegaraan dan keterampilan kewarganegaraan (Bhetari, 2021).

Tujuan utama dari *civic disposition* adalah untuk menumbuhkan karakter warga negara, baik karakter privat seperti; tanggungjawab moral, disiplin diri, dan

penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu, maupun karakter publik misalnya; kepedulian sebagai warga, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berpikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan kompromi (Branson, 1999, p. 23).

Pengemasan Pendidikan Pancasila ke dalam Kurikulum Merdeka dengan tujuan yang sejalan mendukung ketercapaian tujuan Pendidikan Pancasila yang selama ini belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya kasus-kasus dalam masyarakat akibat kegagalan pembelajaran disebabkan oleh implementasi pembelajaran yang kurang baik atau tidak sesuai dengan sistematis pembelajaran yang mana seharusnya tenaga pendidik menerapkan pembelajaran sesuai dengan Kurikulum Merdeka namun tidak menerapkannya. Berbagai faktor penghambat yang ditemui dari sisi guru, dimulai dengan fasilitas yang kurang memadai, tidak adanya kemauan dari segi individu untuk menerapkan pembelajaran berbasis Kurikulum Merdeka, guru tidak hadir ataupun tidak masuk ke kelas, guru yang ingin siswa hanya mencatat sehingga pembelajaran berbasis Kurikulum Merdeka tidak terlaksana dengan maksimal yang seharusnya guru bertanggungjawab mendidik siswa dengan segala hambatan yang ada meminimalisir dengan menerapkan solusi kreatif dari pribadi guru.

Pembelajaran Pendidikan Pancasila yang sekarang ini kurang optimal diterapkan dilihat dari cara peserta didik dalam menyikapi pembelajaran Pendidikan Pancasila menganggap remeh dari sikap yang kurang menghargai pembelajaran Pendidikan Pancasila, hal yang dapat terlihat dari perilaku siswa yang kurang konsentrasi ketika berlangsungnya pembelajaran misalnya bermain *game*,

ribut di dalam kelas, dan sibuk dengan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan pembelajaran Pendidikan Pancasila perilaku tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran Pendidikan Pancasila bukanlah suatu mata pelajaran yang penting bagi kebanyakan siswa. Untuk menekankan tujuan dari pembelajaran Pendidikan Pancasila diperlukan usaha dari tenaga pendidik sebagai fasilitator memberikan pendidikan serta pengetahuan agar tujuan pembelajaran Pendidikan Pancasila berbasis Kurikulum Merdeka terealisasi kepada peserta didik secara tidak langsung akan membentuk *good citizen* terutama watak kewarganegaraan (*civic disposition*).

Sebagai penggerak dalam membentuk karakter peserta didik Kurikulum Merdeka menjadi solusi ditengah banyaknya karakter yang melenceng dari nilai, norma, dan budaya bangsa. Dengan implementasi Kurikulum Merdeka sejalan dengan implementasi Profil Pelajar Pancasila mendukung karakter peserta didik yang sesuai dalam nilai sila-sila Pancasila. Serta hasil belajar siswa yang perlu menekankan materi Pancasila agar pengetahuan dan implementasi karakter Pancasila dapat tertanam dengan baik.

Sebagaimana diketahui bahwa Kurikulum Merdeka diterapkan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila yang sejatinya mendidik peserta didik menjadi warga negara yang baik, tidak jauh berbeda dengan tujuan Kurikulum Merdeka yang mendukung pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan karakter warga negara yang baik, sejalan dengan ini Pendidikan Pancasila merupakan mata pelajaran utama sekaligus mata pelajaran yang sangat penting diperhatikan dan diterapkan dengan baik dan benar.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Implementasi Pembelajaran Pendidikan Pancasila Berbasis Kurikulum Merdeka Dalam Membentuk *Good Citizen* Di Kelas VIII SMP Negeri 24 Medan”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan pembelajaran Pendidikan Pancasila berbasis Kurikulum Merdeka yang diterapkan guru kurang optimal.
2. Terdapatnya kendala yang dihadapi guru pada saat melaksanakan proses pembelajaran berbasis Kurikulum Merdeka.
3. Siswa dinilai kurang menunjukkan karakter warga negara yang baik (*good citizen*) terutama kompetensi *civic disposition*.
4. Banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan peserta didik yang melenceng dari nilai-nilai pembelajaran Pendidikan Pancasila.
5. Kurangnya karakter baik siswa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
6. Terdapatnya peserta didik yang kurang aktif dalam proses pembelajaran.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, agar peneliti lebih terfokus maka dibatasi masalah dengan meneliti permasalahan utama, yaitu:

1. Penerapan pembelajaran Pendidikan Pancasila berbasis Kurikulum Merdeka yang diterapkan guru kurang optimal.
2. Siswa dinilai kurang menunjukkan karakter warga negara yang baik (*good citizen*) terutama kompetensi *civic disposition*.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh implementasi pembelajaran Pendidikan Pancasila berbasis Kurikulum Merdeka dalam membentuk *good citizen* di kelas VIII SMP Negeri 24 Medan?”.

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh implementasi pembelajaran Pendidikan Pancasila berbasis Kurikulum Merdeka dalam membentuk *good citizen* di kelas VIII SMP Negeri 24 Medan.

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1.6.1. Manfaat Teoritis

Penelitian dapat dijadikan kajian ilmu pengetahuan dan pemahaman bagi setiap kalangan terkait dengan pengaruh implementasi pembelajaran Pendidikan

Pancasila berbasis Kurikulum Merdeka dalam membentuk *Good Citizen* di kelas VIII SMP Negeri 24 Medan.

1.6.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menunjang mutu pendidikan di sekolah SMP Negeri 24 Medan.

b. Bagi Guru

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam penerapan metode-metode pengajaran yang efisien diterapkan.

c. Bagi Siswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu siswa memahami manfaat penerapan pembelajaran sehingga siswa dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik.